

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ekonomi dunia secara keseluruhan termasuk Indonesia sedang mengalami perubahan yang pesat dengan adanya faktor-faktor yang mendasarinya. Faktor pertama yaitu globalisasi, pertumbuhan perdagangan dan persaingan yang sangat ketat. Terjadinya persaingan dalam bisnis tidak dapat dihindarkan lagi, bahkan persaingan tersebut kian hari kian bertambah ketat. Untuk mencegah tergusurnya dalam dunia persaingan, perusahaan harus dapat mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan yang lebih profesional untuk mendapatkan perusahaan atau organisasi yang baik. Tetapi untuk mendapatkan hal yang sempurna tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus di benahi, contoh dalam mengelola atau mengidentifikasi sebuah kecurangan sangatlah tidak mudah.

Kecurangan ini apabila dibiarkan merupakan hal yang sangat membahayakan bagi perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi yang terikat dalam sebuah praktek kecurangan mengakibatkan perusahaan atau organisasi menjadi kacau, baik hancurnya reputasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan, rusaknya moral para karyawan yang lebih membahayakan perusahaan akan bangkrut. Para pelaku kecurangan biasanya melakukan kecurangan secara sadar, guna mendapatkan sebuah keuntungan dan kepentingan pribadi atau kelompok.

Cara terbaik agar perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya sebuah pencegahan kecurangan, seperti yang di katakana oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:32) bahwa pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud*). dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan kecurangan yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:33) bahwa pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan cara, menciptakan iklim yang jujur, keterbukaan dan saling membantu, proses rekrutmen yang jujur, pelatihan *fraud awareness*, lingkung kerja yang positif, kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati, program bantuan pegawai yang mendapat kesulitan, dan menanamkan bahwa tindak kecurangan mendapatkan sebuah sanksi yang setimpal.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan, beberapa kasus kecurangan seperti di perusahaan Negara/ BUMN merupakan organisasi atau lembaga kedua yang menepati adanya indikasi kecurangan, salah satunya tindakan korupsi, berdasarkan portal berita kompas.com terbitan 4 April 2017 mengatakan bahwa lembaga BUMN masih kental tindakan budaya korupsi di tubuh BUMN, berdasarkan data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN/ BUMD mencapai 11 kasus pada 2016. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 5 kasus yang sudah di jadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah perkara yang melibatkan BUMN/ BUMD paling banyak 7 kasus, yakni pada 2010 indikasi lainnya terlihat dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang

diterima pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) selama Januari- Februari 2017 PPATK menerima LTKM yang dilakukann pegawai atau pejabat BUMN/BUMD sebanyak 159 laporan. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebanyak 89 laporan.

PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat yang produk jasanya yaitu sarana transportasi kereta api yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Kereta Api Indonesia terdektesi adanya kecurangan walaupun sudah diterapkan, beberapa kasus kecurangan seperti yang diberitakan oleh Detikkasus.com pada 21 Juli 2017 kasus yang terjadi di PT KAI Daop 8 yang membandrol pegawai barunya untuk menjadi pegawai PT KAI di Daerah Operasi (DAOP) 8 Surabaya harus membayar jumlah uang sekitar Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000 hal tersebut dilakukan oleh oknum pegawai PT KAI berinisial RZ (23) dengan iming-iming korban akan diterima bekerja sebagai petugas penjaga jalan lintasan (PJJ) dengan besaran gaji tertentu.

Korban harus menyetorkan uang terlebih dahulu sebagai salah satu syarat diterimanya kerja dengan alasan untuk membeli peralatan kerja seperti laptop dan lain-lain, RZ sudah mendapatkan perjanjian tak tertulis dengan salah satu vendor dimana mereka sudah bersekongkol memanfaatkan orang yang mau bekerja. Setelah mendapatkan uang para korban diterima bekerja sesuai dengan perjanjian. Anehnya setiap orang baru yang diterima secara sepihak pegawai lama terkena PHK dan digantikan oleh pegawai *outsourcing* baru yang sudah membayar uang tersebut.

Berita DetikNews 12 Januari 2015 tentang status pegawai PT KAI yang membuat lingkungan kerja yang tidak positif karena adanya sebuah perbedaan pemberian hak kepada pegawai sehingga memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan apabila tidak di selesaikan. Berita yang dipublikasikan oleh www.DetikNews.com bahwa Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menjelaskan ada tiga kelompok pegawai di PT KAI, pertama pegawai yang masuk kerja sebelum tahun 2009, kedua pegawai yang masuk setelah 2009 dan ketiga pegawai eks PNS yaitu pegawai yang dipindahkan ke KAI dari beberapa departemen di kementerian. Menurut mereka ketiga kelompok tersebut mendapat fasilitas yang berbeda-beda. Dimana pegawai yang direkrut sebelum 2009, status bekerjanya kontrak dengan waktu bekerja yang tetap. Keduanya mendapatkan fasilitas jaminan yang sama yaitu jiwa raya, namun tunjangannya lebih besar yang direkrut sebelum 2009. Sedangkan untuk eks PNS mendapat jaminan TASPEN. Sehingga menurut tidak adanya kesempatan yang sama bagi pegawai dan menimbulkan kecemburuan sosial tentang status pegawai.

Dari kedua kasus terakhir dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya efektivitas pencegahan kecurangan di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Peran penting manajemen risiko dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan perlu di tingkatkan. Pemahaman yang mendalam akan sebuah proses, teknik serta langkah-langkah dalam melakukan proses audit akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dalam menekan angka kecurangan. Selain itu metode *risk based internal audit* merupakan salah satu cara guna mencegah kecurangan seperti yang diungkapkan oleh Albercht.

Menurut Albercht (2012) menyatakan perkataan sebagai berikut “*having a good system of internal control is the single most effective tool in preventing and detecting fraud*” yang artinya bahwa memiliki sistem kontrol internal yang baik adalah single alat yang paling efektif” dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Choirul (2010) dalam penelitiannya berpendapat, bahwa audit internal adanya sebuah perubahan paradigma, yang bermula bahwa auditor itu sebagai *watchdog* sekarang berubah fungsi menjadi memberi kepuasa terhadap pemimpin sebagai mitra manajemen, yaitu sebagai audit internal berbasis risiko yang diharapkan dapat mempercepat mencapai tujuan sebuah organisasi.

Manajemen yang menginginkan suatu risiko yang paling terkecil maka munculah konsep baru yang disebut *risk based internal auditing* (RBIA), konsep ini merupakan audit berbasis risiko yang menghubungkan antara audit internal dengan keseluruhan kerangka manajemen risiko organisasi. Melalui metode RBIA auditor internal meyakinkan bahwa seluruh proses manajemen risiko organisasi telah di jalankan secara efektif.

Penulis melihat adanya permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana pengaruh akan penerapan audit internal berbasis risiko (*risk based internal audit*), dengan ditemukan sejumlah kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan (*Fraud*) di dalam sebuah perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero) dalam sebuah karya ilmiah dengan judul : “ **Pengaruh Pelaksanaan *Risk Based Internal Audit* terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (persero))**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyadari bahwa akan banyak masalah yang akan diteliti. Untuk itu penulis membatasi pembahasan pada ruang lingkup masalah yang ada kaitannya dengan pencegahan *fraud*. Agar masalah yang dibahas ada sebuah kejelasan dan lebih terarah, oleh karena itu penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *risk based internal audit* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana gambaran pencegahan *fraud* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *risk based internal audit* terhadap pencegahan *fraud* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *risk based internal audit* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui gambaran pencegahan *fraud* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pelaksanaan *risk based internal audit* dalam pencegahan *fraud* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

A. Kegunaan praktis

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi bahan sumbangan pemikiran bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan referensi serta bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan guna meningkatkan pengendalian internal dalam perusahaan untuk pencegahan *fraud*.

2. Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat bagi mahasiswa yang terkait dalam penyusunan karya ilmiah ini, diantaranya :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
- b. Memperoleh sebuah pengetahuan tambahan dan membuka wawasan baru yang lebih luas.

B. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan suatu informasi bagi para akademisi sebagai sarana pengembang ilmu atau referensi di bidang yang terkait dengan *risk based internal audit* terhadap *fraud* pada PT. Kereta Api Indonesia (persero). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan lebih lanjut bagi perusahaan.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT Kereta api Indonesia (persero), alamat jalan Perintis Kemerdekaan no.01 Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian dari bulan Januari sampai selesai.